

**Penulis:**

Dr. Drs. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si.  
Dr. H. Rusdjiman Soemaatmadja, M.Si.

Dr. Drs. Syamsul Bahri, M.M.

Dr. Asep Kusnadi, M.Pd.

Dr. Sisca Septiani, M.Pd.

# METODE PENELITIAN ILMU PEMERINTAHAN



# **METODE PENELITIAN ILMU PEMERINTAHAN**

**Dr. Drs. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si.**  
**Dr. H. Rusdjiman Soemaatmadja, M.Si.**  
**Dr. Drs. Syamsul Bahri, M.M.**  
**Dr. Asep Kusnadi, M.Pd.**  
**Dr. Sisca Septiani, M.Pd.**

# METODE PENELITIAN ILMU PEMERINTAHAN

## Penulis:

Dr. Drs. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si.  
Dr. H. Rusdjiman Soemaatmadja, M.Si.  
Dr. Drs. Syamsul Bahri, M.M.  
Dr. Asep Kusnadi, M.Pd.  
Dr. Sisca Septiani, M.Pd.

Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.  
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum.  
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm  
Halaman : x, 174  
ISBN : 978-634-7522-53-5  
Terbit Pada : Mei 2026  
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

## Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

*Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

## PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Kramat, Ds. Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang Prov. Banten  
Email : sadapenerbit@gmail.com  
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com  
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

---

---



Ilmu pemerintahan di Indonesia telah menempuh perjalanan panjang dalam membangun identitas keilmuan yang mandiri dan berwibawa. Sejak kelahirannya sebagai bidang kajian yang kerap dipandang sebagai cabang dari ilmu politik atau administrasi negara, ilmu pemerintahan terus berjuang menemukan jati dirinya. Ia harus meyakinkan komunitas akademik bahwa pemerintahan memiliki objek materia dan objek forma yang khas bukan sekadar irisan dari disiplin yang lebih mapan. Justru di tengah tantangan itulah ilmu pemerintahan menemukan kekuatannya: ia mampu memadukan perspektif kekuasaan, kewenangan, pelayanan, dan akuntabilitas dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Kehadiran buku *Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan* ini merupakan sumbangan intelektual yang penting. Dalam lanskap akademik Indonesia, kebutuhan akan referensi metodologis yang ditulis secara eksplisit untuk konteks ilmu pemerintahan masih belum sepenuhnya terpenuhi. Banyak buku metode penelitian bersifat generik tanpa memberikan perhatian khusus pada keunikan kajian pemerintahan. Buku ini mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan metodologi yang berakar pada tradisi keilmuan pemerintahan itu sendiri.

Kekuatan utama buku ini terletak pada pendekatannya yang komprehensif. Penulis membangun fondasi filosofis yang kokoh melalui pembahasan hakikat dan ontologi ilmu pemerintahan. Pilihan metodologis bukanlah keputusan teknis semata, melainkan konsekuensi logis dari cara pandang terhadap realitas. Pembahasan filsafat ilmu yang mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi

memiliki implikasi konkret: secara ontologis, realitas pemerintahan bersifat multi-lapis; secara epistemologis, pendekatan positivistik dan interpretatif sama-sama berkontribusi; secara aksiologis, dimensi keadilan dan legitimasi tidak pernah terlepas dari kerja ilmiah di bidang ini.

Yang patut diapresiasi khusus adalah pembahasan peran teori dan analisis legalistic distingsi paling mencolok dari penelitian ilmu pemerintahan. Kerangka hukum bukan sekadar latar belakang; ia adalah bagian integral dari realitas yang dikaji. Kewenangan pemerintah lahir dari mandat konstitusional; prosedur pengambilan keputusan diatur oleh norma hukum administratif; standar pelayanan ditetapkan melalui regulasi. Penulis berhasil menunjukkan bahwa analisis legalistik dan teoretis harus diintegrasikan dalam satu kerangka yang koheren.

Pembahasan metode kuantitatif dan kualitatif beserta studi kasus disajikan secara seimbang. Metode kuantitatif berguna untuk mengukur kinerja pelayanan publik dan menguji hubungan antarvariabel kebijakan. Metode kualitatif memungkinkan peneliti menggali proses yang tidak tampak di permukaan bagaimana keputusan sesungguhnya dibuat atau bagaimana kebijakan menghasilkan dampak berbeda di konteks yang berlainan. Keseimbangan ini menunjukkan kedewasaan intelektual penulis dalam menyikapi perdebatan paradigmatic.

Panduan tentang masalah penelitian dan *state-of-the-art* memberikan arahan praktis yang sangat dibutuhkan. Dalam ilmu pemerintahan, masalah penelitian harus bersumber dari kesenjangan antara das Sollen dan das Sein dalam penyelenggaraan pemerintahan. Buku ini juga membahas teknik pengumpulan dan analisis data lapangan secara operasional, termasuk tantangan unik seperti akses informasi yang dibatasi oleh birokrasi, informan pejabat yang cenderung normatif, serta aspek etika dan keamanan data.

Buku ini merupakan bagian dari upaya membangun tradisi penelitian pemerintahan yang kuat di Indonesia. Kualitas tata kelola tidak bisa dipisahkan dari kualitas penelitian yang mendukungnya. Di

tengah era transformasi digital, desentralisasi, serta tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, fenomena seperti *e-government*, *collaborative governance*, dan pelayanan berbasis data menuntut pendekatan penelitian yang adaptif dan inovatif.

Buku ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, tesis, atau disertasi, tetapi juga bagi dosen pembimbing penelitian, peneliti yang mengkaji isu pemerintahan aktual, serta praktisi yang ingin mendasarkan kebijakan dan program mereka pada bukti ilmiah. Bagi kalangan praktisi, memahami metodologi penelitian berarti mampu membaca hasil penelitian secara kritis, menilai kualitas bukti, dan menggunakan temuan sebagai masukan bagi pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, buku ini juga berperan sebagai jembatan antara dunia akademik dan dunia praktik pemerintahan.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada penulis atas kerja keras dan dedikasinya. Semoga buku ini menjadi rujukan utama di lingkungan program studi ilmu pemerintahan seluruh Indonesia, memperkuat mutu karya ilmiah, dan mendorong lahirnya penelitian yang berdampak nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi setiap upaya yang ditujukan untuk kebaikan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat.

Yogyakarta, 6 April 2026

**Prof. Agus Pramusinto, MDA., Ph.D.**

*Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM*

*Ketua Indonesian Association for Public Administration (IAPA)*

*Presiden Asian Association for Public Administration (AAPA)*

*Ketua Majelis Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK)*

# PRAKATA

---

---

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai rujukan yang menempatkan metodologi penelitian dalam kerangka kekhasan disiplin ilmu pemerintahan, memadukan fondasi filosofis, kerangka teoretis, dimensi legalistik, serta panduan teknis penelitian.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada keluarga tercinta yang senantiasa mendampingi dengan kesabaran dan doa; rekan-rekan sejawat yang memberikan masukan kritis dan menjadi mitra diskusi; penerbit PT Sada Kurnia Pustaka beserta tim editor dan desain yang bekerja profesional; serta seluruh mahasiswa yang menjadi inspirasi melalui semangat mereka dalam menyelesaikan karya ilmiah di bidang pemerintahan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di edisi mendatang. Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan praktisi pemerintahan dalam mengembangkan penelitian yang bermutu dan berdampak nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Jakarta, April 2026

Penulis

# DAFTAR ISI

---

---

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 HAKIKAT DAN ONTOLOGI ILMU PEMERINTAHAN.....</b>	<b>1</b>
A.    Pendahuluan .....	1
B.    Ilmu Pemerintahan sebagai Disiplin Ilmu .....	2
C.    Objek Matera dan Objek Forma Ilmu Pemerintahan .....	5
D.    Hakikat Pemerintahan: Kekuasaan, Kewenangan, dan Legitimasi.....	8
E.    Pemerintahan sebagai Pelayanan Publik dan Produksi Nilai Publik.....	10
F.    Konsep Kunci dan Unit Analisis dalam Ilmu Pemerintahan ..	13
G.    Distingsi Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Politik dan Administrasi Publik.....	15
H.    Implikasi Ontologi Ilmu Pemerintahan terhadap Penelitian.	18
I.    Rangkuman.....	21
<b>BAB 2 FILSAFAT ILMU DAN METODOLOGI PENELITIAN PEMERINTAHAN .....</b>	<b>22</b>
A.    Pendahuluan .....	22
B.    Filsafat Ilmu: Pengertian, Fungsi, dan Relevansinya bagi Ilmu Pemerintahan.....	23
C.    Ontologi Penelitian Pemerintahan .....	24
D.    Epistemologi: Cara Memperoleh Pengetahuan Ilmiah tentang Pemerintahan.....	27
E.    Aksiologi: Nilai, Etika, dan Kebermanfaatan Penelitian Pemerintahan.....	30
F.    Paradigma Penelitian dalam Ilmu Pemerintahan .....	32
G.    Metodologi Penelitian Pemerintahan: Kerangka Kerja dan Tahapan .....	35

H. Kriteria Kualitas dan Kebenaran dalam Penelitian Pemerintahan.....	37
I. Rangkuman.....	39
<b>BAB 3 MASALAH PENELITIAN DAN STATE-OF-THE-ART.....</b>	<b>41</b>
A. Pendahuluan .....	41
B. Masalah Penelitian dalam Ilmu Pemerintahan .....	42
C. Dari Topik ke Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian.....	45
D. Tinjauan Pustaka dan <i>State-of-The-Art</i> dalam Penelitian Pemerintahan.....	48
E. Merancang Strategi Literature Review untuk menyusun SoTA .....	51
F. Menemukan <i>Knowledge Gap</i> dan Merumuskan Kebaruan Penelitian .....	55
G. Membangun Kerangka Konseptual dan Argumen Penelitian dari SoTA.....	57
H. Menulis SoTA dan Tinjauan Pustaka secara Akademik.....	59
I. Rangkuman.....	61
<b>BAB 4 PERAN TEORI DAN LEGALISTIK DALAM ANALISIS PEMERINTAHAN .....</b>	<b>63</b>
A. Pendahuluan .....	63
B. Teori sebagai Pisau Analisis dalam Ilmu Pemerintahan.....	64
C. Ragam Teori dan Level Analisis Pemerintahan .....	68
D. Memilih dan Menggunakan Teori secara Tepat dalam Penelitian Pemerintahan.....	70
E. Rasionalitas Legalistik: Mengapa Kerangka Hukum Tidak Bisa Ditinggalkan.....	73
F. Kerangka Analisis Legalistik dalam Penelitian Pemerintahan .. ..	77
G. Integrasi Teori dan Legalistik dalam Desain Penelitian Pemerintahan.....	80
H. Ilustrasi Penerapan: Analisis Standar Pelayanan dalam Kerangka Teori dan Norma.....	82
I. Rangkuman.....	86

<b>BAB 5 METODE PENELITIAN KUANTITATIF DALAM PEMERINTAHAN .....</b>	<b>88</b>
A. Pendahuluan .....	88
B. Posisi Metode Kuantitatif dalam Ilmu Pemerintahan .....	89
C. Desain Penelitian Kuantitatif: Ragam, Tujuan, dan Pertimbangan Pemilihan .....	90
D. Teori, Kerangka Konseptual, Variabel, dan Hipotesis .....	92
E. Operasionalisasi Variabel dan Skala Pengukuran .....	94
F. Populasi, Kerangka Sampel, dan Teknik Sampling .....	97
G. Instrumen Penelitian: Kuesioner, Skala, dan Data Sekunder Pemerintahan .....	100
H. Uji Kualitas Instrumen: Validitas dan Reliabilitas .....	101
I. Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif: Survei, Eksperimen, dan Pemanfaatan Data Sekunder .....	103
J. Pengolahan dan Analisis Data Statistik .....	105
K. Pelaporan Hasil Kuantitatif dan Penarikan Implikasi Bagi Kebijakan Pemerintahan .....	108
L. Etika, Integritas Data, dan Risiko Bias dalam Penelitian Kuantitatif Pemerintahan .....	109
M. Rangkuman .....	110
<b>BAB 6 METODE PENELITIAN KUALITATIF DAN STUDI KASUS</b>	<b>111</b>
A. Pendahuluan .....	111
B. Posisi Metode Kualitatif dalam Ilmu Pemerintahan .....	112
C. Paradigma dan Orientasi Penelitian Kualitatif .....	114
D. Karakteristik Utama Penelitian Kualitatif .....	116
E. Peneliti sebagai Instrumen, Refleksivitas, dan Etika Relasional .....	117
F. Desain Penelitian Kualitatif: Ragam Tradisi dan Strategi ....	118
G. Studi Kasus dalam Penelitian Pemerintahan .....	120
H. Penentuan Kasus, Unit Analisis, dan Strategi Sampling .....	122
I. Teknik Pengumpulan Data Kualitatif di Lapangan Pemerintahan .....	125
J. Pengelolaan Data dan Pencatatan Lapangan .....	127

K.	Analisis Data Kualitatif: Coding, Tematik, dan Model Interaktif .....	129
L.	Keabsahan Temuan: <i>Trustworthiness</i> , Triangulasi, dan Audit Evidensi .....	133
M.	Menulis Laporan Penelitian Kualitatif dan Studi Kasus .....	135
N.	Peran Teori dan Konsep dalam Penelitian Kualitatif Pemerintahan.....	137
O.	Kesalahan Umum dalam Penelitian Kualitatif Pemerintahan dan Cara Menghindarinya.....	138
P.	Rangkuman .....	139
<b>BAB 7 TEKNIK PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA LAPANGAN</b> .....		<b>141</b>
A.	Pendahuluan .....	141
B.	Karakter Data Lapangan dalam Penelitian Pemerintahan ..	142
C.	Pemetaan Teknik Pengumpulan Data Lapangan.....	143
D.	Etika, Akses, dan Perizinan Kerja Lapangan.....	144
E.	Wawancara Mendalam dalam Setting Pemerintahan.....	146
F.	Observasi: Menangkap Praktik Pemerintahan yang Sesungguhnya.....	149
G.	Dokumentasi, Arsip, dan Data Sekunder Pemerintahan .....	151
H.	Survei Lapangan: Kendali Mutu dan Praktik Pengukuran...	153
I.	Pengelolaan Data Lapangan dan Keamanan Data.....	154
J.	Teknik Analisis Data Kualitatif.....	155
K.	Teknik Analisis Data Kuantitatif Lapangan.....	158
L.	Triangulasi dan Pemeriksaan Keabsahan Data.....	159
M.	Rangkuman .....	161
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>162</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS</b> .....		<b>169</b>

# BAB 1

## HAKIKAT DAN ONTOLOGI ILMU PEMERINTAHAN

---

---

### A. Pendahuluan

Metode penelitian tidak dapat dipisahkan dari cara sebuah disiplin ilmu memahami realitas yang dikajinya. Dalam bahasa filsafat ilmu, cara pandang tersebut disebut ontologi: asumsi tentang “apa yang ada” dan “apa yang layak dijadikan objek kajian” oleh ilmu. Bab ini menempatkan ontologi sebagai pintu masuk karena penelitian pemerintahan kerap terjebak pada kebingungan batas kajian: apakah penelitian tentang pemerintah sama dengan penelitian politik? Apakah studi tentang birokrasi otomatis menjadi administrasi publik? Atau, apakah semua kajian tentang negara dapat disebut ilmu pemerintahan?

Kebingungan batas tersebut bukan semata persoalan terminologi. Ia berdampak langsung pada pilihan teori, desain penelitian, jenis data yang dianggap sah, hingga cara menarik kesimpulan. Seorang peneliti yang memandang pemerintahan terutama sebagai arena perebutan kekuasaan, misalnya, akan cenderung fokus pada aktor, kontestasi, dan strategi politik. Sebaliknya, peneliti yang memandang pemerintahan sebagai mekanisme penyelenggaraan urusan publik akan menekankan desain kelembagaan, proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan kualitas pelayanan publik.

Ilmu pemerintahan di Indonesia berkembang sebagai disiplin yang memiliki titik berat khas. Banyak literatur menegaskan bahwa ilmu pemerintahan bukan sekadar cabang dari ilmu politik, melainkan disiplin yang mempelajari pemerintahan sebagai proses “mengemudikan” kehidupan bersama melalui kewenangan yang sah dan orientasi pelayanan bagi warga (Ndraha, 2003; Syafiie, 2022). Dalam kerangka ini, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah antara pemerintah dan rakyat menjadi pusat analisis.

Bab ini membahas hakikat (*nature*) dan ontologi ilmu pemerintahan, termasuk objek materia dan objek forma, konsep kunci, serta pembedaan dengan disiplin serumpun. Dengan fondasi ini, bab-bab berikutnya mengenai filsafat ilmu, perumusan masalah, teori, dan metode penelitian kuantitatif-kualitatif dapat dipahami sebagai perangkat yang konsisten dengan karakter keilmuan pemerintahan.

## **B. Ilmu Pemerintahan sebagai Disiplin Ilmu**

### **1. Pengertian Ilmu Pemerintahan**

Secara sederhana, ilmu pemerintahan dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana urusan publik diselenggarakan oleh institusi yang memiliki kewenangan memerintah, serta bagaimana kewenangan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan kolektif melalui kebijakan dan pelayanan publik. Dalam tradisi Indonesia, sejumlah sarjana menekankan bahwa ilmu pemerintahan menyoroti relasi antara pemerintah (yang memerintah) dan rakyat/warga (yang diperintah) sebagai relasi kewenangan sekaligus relasi pelayanan (Ndraha, 2003; Wasistiono & Simangunsong, 2015).

Pengertian tersebut perlu dibedakan dari pemahaman sehari-hari. Dalam percakapan umum, istilah “pemerintah” sering dipersempit menjadi “penguasa” atau “aparatur.” Dalam konteks keilmuan, pemerintah (*government*) merujuk pada aktor dan lembaga yang secara sah memegang kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat, mengalokasikan sumber daya publik, serta memastikan kepatuhan melalui perangkat hukum dan kebijakan. Sementara itu, “pemerintahan”

(*governance* dalam arti luas, atau *governing* dalam arti proses) merujuk pada keseluruhan proses penyelenggaraan urusan publik: perumusan tujuan, pembuatan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi.

Syafiie (2022) menyatakan bahwa ilmu pemerintahan telah berkembang sebagai disiplin yang berdiri sendiri, keluar dari bayang-bayang ilmu politik, ilmu negara, maupun administrasi negara. Penegasan ini penting bukan untuk memisahkan disiplin secara kaku, melainkan untuk menegaskan sudut pandang khas: pemerintahan dipelajari sebagai praktik dan sistem penyelenggaraan kepentingan umum, bukan semata sebagai persaingan kekuasaan atau sebagai manajemen organisasi publik.

Taliziduhu Ndraha memperkenalkan gagasan *kybernology* (kybernologi) sebagai upaya merekonstruksi ilmu pemerintahan. *Kybernology* berangkat dari akar kata Yunani "*kybernan*" yang berarti mengemudikan/menakhodai; pemerintahan dipahami sebagai aktivitas mengemudikan sistem sosial untuk mencapai arah tertentu, dengan memadukan aspek kekuasaan, kewenangan, serta pelayanan (Ndraha, 2003). Perspektif ini menekankan bahwa pemerintahan bukan sekadar mesin birokrasi, tetapi sistem hidup yang dinamis: ada tujuan, ada nilai, ada konflik, ada adaptasi, dan ada konsekuensi kebijakan bagi warga.

## **2. Ruang Lingkup Kajian Ilmu Pemerintahan**

Ruang lingkup ilmu pemerintahan dapat dipetakan setidaknya pada empat ranah besar: (1) struktur dan kelembagaan pemerintahan; (2) proses pemerintahan (*governing process*); (3) fungsi pemerintahan; dan (4) hubungan pemerintahan dengan lingkungan sosial, ekonomi, budaya, serta hukum.

Pertama, ranah struktur dan kelembagaan mencakup kajian tentang sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, organisasi pemerintah, hubungan antar lembaga (eksekutif, legislatif, yudikatif), hubungan pusat-daerah, serta desain kelembagaan pada level lokal (kecamatan, desa/kelurahan). Di sini ilmu pemerintahan memeriksa apakah desain kelembagaan menghasilkan koordinasi yang efektif, akuntabilitas yang jelas, dan pelayanan yang responsif.

Kedua, ranah proses pemerintahan mengkaji bagaimana keputusan publik dibuat dan dijalankan: proses perencanaan, penyusunan anggaran, pembuatan kebijakan, implementasi program, koordinasi antar perangkat daerah, mekanisme pengaduan, hingga evaluasi kinerja. Dalam ranah ini, perhatian diberikan pada “bagaimana” pemerintahan bekerja, bukan hanya “siapa” yang berkuasa.

Ketiga, ranah fungsi pemerintahan mencakup fungsi regulasi (membuat aturan), fungsi pelayanan (memberikan layanan publik), fungsi pembangunan (*developmental*), fungsi perlindungan (*security and safety*), dan fungsi pemberdayaan (*empowerment*). Perubahan sosial dan tuntutan warga membuat bobot fungsi-fungsi tersebut dapat bergeser; misalnya, era digital mendorong fungsi pelayanan dan koordinasi lintas aktor menjadi semakin menonjol melalui layanan berbasis data dan platform.

Keempat, ranah hubungan pemerintahan dengan lingkungan mencakup kajian tentang pengaruh nilai budaya, struktur sosial, kondisi ekonomi, dinamika politik, serta kerangka hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan tidak berjalan di ruang hampa; kebijakan yang sama dapat menghasilkan kinerja berbeda karena kapasitas aparatur, jaringan aktor, dan konteks lokal yang berbeda.

Dengan ruang lingkup yang luas tersebut, ilmu pemerintahan bersifat interdisipliner. Ia memanfaatkan temuan sosiologi (misalnya tentang organisasi dan perilaku), ekonomi (misalnya tentang insentif dan pengalokasian sumber daya), hukum (misalnya tentang kewenangan dan prosedur), serta ilmu politik (misalnya tentang representasi dan legitimasi). Namun, interdisipliner bukan berarti tanpa identitas. Identitas ilmu pemerintahan terletak pada fokusnya pada penyelenggaraan urusan publik melalui kewenangan yang sah, yang pada akhirnya dinilai dari dampaknya bagi warga.

### **3. Posisi Ilmu Pemerintahan dalam Rumpun Ilmu Sosial**

Dalam rumpun ilmu sosial, ilmu pemerintahan menempati posisi yang beririsan dengan ilmu politik dan administrasi publik. Perbedaannya terutama terletak pada titik berat: ilmu politik banyak mengkaji kekuasaan sebagai fenomena sosial-politik, seperti kompetisi

elite, partai politik, pemilu, dan perilaku memilih. Administrasi publik banyak mengkaji manajemen organisasi publik dan implementasi kebijakan, seperti manajemen SDM aparatur, reformasi birokrasi, desain pelayanan, dan kinerja organisasi.

Ilmu pemerintahan berada di antara keduanya: ia mengkaji bagaimana kewenangan politik diterjemahkan menjadi tindakan pemerintahan yang mengikat dan melayani; bagaimana keputusan kolektif diproduksi, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, ilmu pemerintahan memeriksa “rantai pemerintahan” (*governing chain*) dari legitimasi (mandat) menuju kebijakan, pelaksanaan, pelayanan, hingga akuntabilitas.

Posisi ini penting untuk metodologi penelitian. Penelitian pemerintahan tidak cukup berhenti pada analisis kontestasi politik, dan tidak cukup pula hanya mengukur efisiensi administrasi. Penelitian pemerintahan perlu mampu menjelaskan hubungan sebab-akibat atau hubungan makna (tergantung paradigma) antara keputusan pemerintah, perilaku aparatur, respons warga, serta perubahan kondisi publik.

## **C. Objek Materia dan Objek Forma Ilmu Pemerintahan**

Pembahasan ontologi biasanya dimulai dengan pertanyaan: “Apa yang sebenarnya dikaji oleh ilmu pemerintahan?” Untuk menjawabnya, tradisi filsafat ilmu membedakan antara objek materia dan objek forma. Perbedaan ini membantu peneliti memahami batas wilayah kajian sekaligus sudut pandang khas yang digunakan ilmu tersebut.

### **1. Memahami Konsep Objek Materia dan Objek Forma**

Objek materia adalah “bahan mentah” realitas yang dapat dikaji oleh berbagai disiplin. Misalnya, negara, kebijakan publik, birokrasi, atau perilaku warga dapat menjadi objek materia bagi ilmu politik, sosiologi, ekonomi, hukum, administrasi publik, maupun ilmu pemerintahan. Karena bersifat lintas disiplin, objek materia saja tidak cukup untuk menandai identitas sebuah ilmu.

Objek forma adalah sudut pandang, fokus, atau aspek tertentu dari objek materia yang disoroti sehingga suatu disiplin memiliki kekhasan. Dengan objek forma, disiplin menentukan pertanyaan

khasnya, konsep kuncinya, dan cara membangun penjelasan. Perbedaan ini menegaskan bahwa ilmu pemerintahan tidak “mengklaim” monopoli atas negara atau birokrasi, tetapi memiliki cara khas untuk melihatnya: sebagai arena dan mekanisme penyelenggaraan kewenangan yang sah untuk melayani urusan publik (Ndraha, 2003; Wasistiono & Simangunsong, 2015).

## **2. Objek Materia Ilmu Pemerintahan**

Dalam banyak literatur pemerintahan Indonesia, objek materia ilmu pemerintahan sering dikaitkan dengan negara dan pemerintahan sebagai organisasi terbesar yang mengelola urusan publik, termasuk perangkat kelembagaan, sumber daya, dan aturan main yang mengikat warga (Ndraha, 2003; Syafiie, 2022). Negara di sini dipahami bukan hanya sebagai wilayah, tetapi sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki legitimasi untuk menetapkan keputusan mengikat dan memaksa dalam kerangka hukum.

Namun, perkembangan konsep *governance* mengingatkan bahwa penyelenggaraan urusan publik tidak selalu dilakukan oleh pemerintah sendirian. Banyak urusan publik diselenggarakan melalui jejaring aktor: pemerintah, masyarakat sipil, sektor privat, komunitas lokal, dan bahkan aktor internasional. Dalam konteks ini, objek materia ilmu pemerintahan dapat diperluas menjadi “urusan publik” dan “tata kelola” (*governance*) yang melibatkan pemerintah sebagai aktor kunci, tetapi tidak tunggal.

Di Indonesia, perluasan objek materia ini tampak pada isu-isu seperti kolaborasi penanganan bencana, kemitraan layanan kesehatan, pengelolaan sampah berbasis komunitas, hingga digitalisasi layanan melalui platform yang melibatkan penyedia teknologi. Ilmu pemerintahan tetap relevan karena ia menyoroti bagaimana kewenangan pemerintah digunakan untuk mengatur kolaborasi, menetapkan standar, memastikan perlindungan hak warga, dan menjaga akuntabilitas.

## **3. Objek Forma Ilmu Pemerintahan**

Objek forma ilmu pemerintahan dapat dirumuskan sebagai relasi antara yang memerintah dan yang diperintah, khususnya mengenai penggunaan kewenangan (*authority*) yang sah untuk mengarahkan,

mengatur, dan melayani urusan publik. Relasi ini mencakup mandat (legitimasi), pembuatan keputusan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, ilmu pemerintahan menempatkan “kewenangan dan pelayanan” sebagai dua sisi yang tidak terpisahkan (Ndraha, 2003).

Dengan objek forma tersebut, fokus ilmu pemerintahan bukan semata “siapa berkuasa”, melainkan “bagaimana kewenangan dijalankan” dan “untuk tujuan publik apa.” Kualitas pemerintahan dinilai dari sejauh mana kewenangan digunakan secara sah, adil, efektif, dan menghasilkan layanan serta kebijakan yang menjawab kebutuhan warga. Aspek normatif (misalnya keadilan, kepatutan, dan etika pelayanan) dan aspek empirik (misalnya kinerja, responsivitas, kepatuhan warga) bertemu di sini.

Objek forma juga menjelaskan mengapa penelitian pemerintahan sering menuntut perhatian pada dimensi legalistik (aturan perundang-undangan) sekaligus dimensi sosial (perilaku aktor dan respons warga). Kewenangan selalu melekat pada norma hukum dan prosedur, sedangkan implementasi kewenangan terjadi dalam realitas sosial yang penuh keterbatasan kapasitas, konflik kepentingan, dan keragaman konteks.

**Tabel 1.1. Perbedaan Objek Materia dan Objek Forma Ilmu Pemerintahan**

<b>Aspek</b>	<b>Objek Materia</b>	<b>Objek Forma</b>
Pengertian	Realitas/bahan kajian yang dapat diteliti oleh banyak disiplin (misalnya: negara, kebijakan publik, birokrasi, pelayanan publik, tata kelola).	Sudut pandang khas ilmu pemerintahan terhadap objek materia: relasi pemerintah-rakyat dalam penggunaan kewenangan yang sah untuk menyelenggarakan urusan publik dan pelayanan.
Pertanyaan kunci	Fenomena apa yang terjadi dalam penyelenggaraan urusan publik?	Bagaimana kewenangan dijalankan; bagaimana keputusan dibuat dan dipertanggungjawabkan; bagaimana dampaknya bagi warga?

Aspek	Objek Materia	Objek Forma
Unit analisis yang lazim	Lembaga pemerintah, program/kebijakan, aparatur, warga/penerima layanan, jejaring aktor tata kelola.	Proses governing, mekanisme kewenangan, praktik pelayanan, relasi akuntabilitas, serta interaksi pemerintah-warga.
Konsekuensi bagi penelitian	Menentukan bidang isu (misalnya desa, kota, kebencanaan, kesehatan publik).	Menentukan fokus analisis (misalnya legitimasi, kewenangan, pelayanan, akuntabilitas) serta memilih teori/pisau analisis yang tepat.

Sumber: diolah penulis

## D. Hakikat Pemerintahan: Kekuasaan, Kewenangan, dan Legitimasi

Jika objek forma ilmu pemerintahan berpusat pada relasi kewenangan dan pelayanan, maka konsep dasar yang perlu dipahami adalah perbedaan antara kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), dan legitimasi (*legitimacy*). Ketiga konsep ini membentuk fondasi untuk menilai apakah tindakan pemerintah hanya “mampu memaksa” atau benar-benar “berhak memerintah” dan “layak dipercaya” oleh warga.

### 1. Kekuasaan dan Kewenangan: dari kemampuan memaksa ke hak memerintah

Kekuasaan pada dasarnya adalah kemampuan memengaruhi perilaku pihak lain, baik melalui persuasi, insentif, maupun paksaan. Dalam kehidupan sosial, kekuasaan dapat lahir dari banyak sumber: kekayaan, status sosial, kontrol informasi, jaringan, atau kekuatan fisik. Namun, tidak semua kekuasaan otomatis sah untuk digunakan dalam penyelenggaraan urusan publik.

Kewenangan adalah kekuasaan yang memperoleh pengakuan sebagai sah (*legitimate power*). Kewenangan melekat pada jabatan, lembaga, dan prosedur yang diatur oleh hukum dan norma politik. Dalam negara modern, kewenangan pemerintah dibatasi sekaligus diberi dasar oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta mandat

demokratis. Karena itu, membahas pemerintahan berarti membahas praktik penggunaan kewenangan: siapa berwenang melakukan apa, melalui prosedur apa, dan dengan batasan apa.

Dalam praktik, kekuasaan dan kewenangan sering bertemu. Pemerintah yang memiliki kewenangan formal tetap membutuhkan kapasitas (sumber daya, aparatur, data) agar kewenangannya efektif. Sebaliknya, kekuasaan tanpa kewenangan dapat menghasilkan pemerintahan yang koersif dan tidak akuntabel. Ilmu pemerintahan mempelajari ketegangan ini, misalnya ketika kebijakan dibentuk tanpa partisipasi warga atau ketika kewenangan disalahgunakan untuk kepentingan sempit.

## **2. Legitimasi dan Kepatuhan Warga**

Legitimasi merujuk pada penerimaan warga terhadap hak pemerintah untuk memerintah. Legitimasi dapat bersumber dari berbagai dasar, misalnya legal-rasional (berdasarkan aturan formal), tradisional (berdasarkan adat), atau karismatik (berdasarkan kualitas pribadi pemimpin). Dalam pemerintahan demokratis modern, legitimasi legal-rasional dan legitimasi demokratis (mandat melalui pemilihan) menjadi sangat penting.

Legitimasi berperan langsung dalam kepatuhan (*compliance*). Ketika warga memandang pemerintah sah dan bertindak adil, kepatuhan tidak selalu membutuhkan paksaan; warga cenderung patuh karena merasa aturan itu wajar dan prosesnya dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, ketika legitimasi menurun misalnya karena korupsi, diskriminasi, atau pelayanan publik yang buruk biaya kepatuhan meningkat dan pemerintah cenderung mengandalkan kontrol koersif.

Di sinilah hubungan antara legitimasi dan pelayanan publik menjadi nyata. Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya menghasilkan kepuasan pengguna layanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan (*trust*) dan legitimasi. Dalam banyak kasus, pengalaman warga saat mengurus layanan dasar (administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan) menjadi “wajah” pemerintah yang paling dekat dan paling menentukan penilaian warga terhadap negara.

### **3. Akuntabilitas sebagai Jembatan Kewenangan dan Pelayanan**

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan menerima konsekuensi atas tindakan serta penggunaan sumber daya publik. Akuntabilitas bekerja sebagai jembatan antara kewenangan dan pelayanan: kewenangan memberi pemerintah hak bertindak, sedangkan akuntabilitas memastikan tindakan itu tetap berada dalam koridor tujuan publik.

Dalam praktik pemerintahan, akuntabilitas berlapis: akuntabilitas politik (kepada warga melalui mekanisme pemilu dan representasi), akuntabilitas administratif (kepada atasan dan sistem pengawasan internal), akuntabilitas hukum (kepada lembaga peradilan dan aturan perundang-undangan), serta akuntabilitas sosial (kepada masyarakat melalui media, organisasi masyarakat sipil, dan mekanisme pengaduan). Penelitian pemerintahan sering mengkaji bagaimana lapis-lapis akuntabilitas ini bekerja atau justru gagal bekerja di tingkat pusat maupun daerah.

Dengan kerangka ini, ilmu pemerintahan tidak cukup hanya menilai “apakah program berjalan”, tetapi juga “mengapa berjalan” (mekanisme kewenangan dan koordinasi), “bagi siapa berjalan” (kelompok sasaran), dan “dengan biaya sosial apa” (keadilan, akses, serta dampak bagi kelompok rentan).

## **E. Pemerintahan sebagai Pelayanan Publik dan Produksi Nilai Publik**

Salah satu pembeda penting ilmu pemerintahan dengan disiplin sosial lain adalah penekanan pada orientasi pelayanan. Dalam perspektif pemerintahan demokratis, pemerintah bukan hanya pemegang kewenangan, melainkan pengemban amanat untuk memenuhi hak-hak dasar warga dan menyelenggarakan kepentingan umum. Orientasi ini membuat kajian pemerintahan selalu berhadapan dengan pertanyaan normatif sekaligus empirik: pelayanan publik seperti apa yang adil; bagaimana mengukurnya; dan bagaimana memperbaikinya.

Di Indonesia, pelayanan publik bukan isu perifer, melainkan bagian dari mandat negara. Negara dipahami sebagai penyelenggara pelayanan dasar dan pelindung warga. Karena itu, kualitas pelayanan publik menjadi indikator konkret bagi “hadirnya” negara. Warga mungkin tidak setiap hari berinteraksi dengan parlemen atau pengadilan, tetapi mereka berinteraksi dengan layanan administrasi, sekolah, puskesmas, perizinan usaha, dan layanan sosial. Pengalaman layanan inilah yang sering membentuk persepsi warga tentang pemerintahan yang baik atau buruk.

### **1. Pelayanan Publik sebagai Ukuran Kinerja Pemerintahan**

Pelayanan publik dapat dipahami sebagai rangkaian aktivitas pemerintah dalam menyediakan barang/jasa publik maupun layanan administratif kepada warga, dengan standar tertentu yang menjamin akses, kepastian waktu, kepastian biaya, serta perlakuan yang adil. Pelayanan publik tidak terbatas pada pelayanan administratif (misalnya KTP, izin usaha, sertifikat tanah), tetapi juga layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perlindungan sosial.

Dalam penelitian pemerintahan, pelayanan publik dapat dianalisis dari berbagai dimensi: (a) kualitas layanan (ketepatan waktu, ketepatan prosedur, keramahan, kemudahan akses); (b) pemerataan dan keadilan akses (siapa yang terlayani dan siapa yang tertinggal); (c) kapasitas organisasi layanan (SDM, anggaran, infrastruktur, sistem informasi); (d) integritas dan anti-korupsi (pungutan liar, konflik kepentingan); serta (e) mekanisme pengaduan dan perbaikan berkelanjutan.

Indikator-indikator tersebut membantu peneliti melihat pelayanan publik sebagai fenomena pemerintahan: bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan desain kewenangan, budaya organisasi, kepemimpinan, dan akuntabilitas. Misalnya, layanan perizinan yang lambat bisa disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan antar dinas, prosedur yang berlebihan, atau insentif informal yang mendorong praktik rente.

### **2. Dari Output ke Nilai Publik**

Dalam literatur administrasi dan pemerintahan modern, ukuran keberhasilan pemerintah tidak hanya dilihat dari output (berapa banyak

layanan diberikan), tetapi dari *outcome* dan nilai publik (*public value*): perubahan apa yang dirasakan warga dan manfaat kolektif apa yang dihasilkan. Konsep nilai publik menekankan bahwa tindakan pemerintah seharusnya menghasilkan manfaat yang diakui publik, seperti meningkatnya rasa aman, meningkatnya akses layanan, menurunnya ketimpangan, atau meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Kerangka nilai publik menuntut peneliti untuk menghubungkan keputusan pemerintahan dengan dampak yang lebih luas. Misalnya, program penataan PKL bukan hanya soal penertiban (*output*), tetapi juga soal dampak terhadap mata pencaharian, ketertiban kota, serta relasi pemerintah-warga. Dalam konteks ini, penelitian pemerintahan dapat menggabungkan analisis kebijakan, analisis sosial-ekonomi, serta analisis legitimasi dan partisipasi.

### **3. Pergeseran Paradigma: Memerintah, Mengelola, dan Melayani**

Perkembangan praktik pemerintahan menunjukkan adanya pergeseran paradigma. Pada satu sisi, terdapat paradigma administratif yang menekankan hierarki, aturan, dan kepatuhan prosedural. Pada sisi lain, muncul paradigma manajerial yang menekankan efisiensi, kinerja, dan inovasi layanan. Lebih lanjut, berkembang paradigma pelayanan publik dan tata kelola kolaboratif yang menekankan demokrasi, partisipasi warga, serta kerja bersama lintas aktor.

Bagi ilmu pemerintahan, pergeseran paradigma ini penting karena mengubah cara memandang relasi pemerintah-rakyat. Pemerintahan yang semula dipahami sebagai “*command and control*” bergeser menuju model yang lebih responsif, transparan, dan berbasis kebutuhan pengguna layanan. Pemerintah tidak cukup “mengatur dari atas”, tetapi perlu mendengar, bernegosiasi, dan membangun kolaborasi untuk menyelesaikan masalah publik yang kompleks (misalnya kemiskinan, banjir, stunting, pengangguran).

**Tabel 1.2. Pergeseran Orientasi Pemerintahan: Dari Ketaatan Prosedur ke Nilai Publik**

<b>Dimensi</b>	<b>Pendekatan Birokratik</b>	<b>Pendekatan Manajerial</b>	<b>Pendekatan Pelayanan &amp; Tata Kelola</b>
Orientasi utama	Ketaatan aturan dan prosedur	Efisiensi dan kinerja organisasi	Pemenuhan kebutuhan warga dan nilai publik
Relasi pemerintah-warga	Warga sebagai objek/yang diatur	Warga sebagai pelanggan layanan	Warga sebagai warga negara (citizen) dan mitra kolaborasi
Ukuran keberhasilan	Tertib administrasi, ketaatan prosedur	Output, target kinerja, biaya satuan	Outcome, keadilan akses, kepercayaan publik, dampak sosial
Instrumen dominan	Regulasi, hierarki, kontrol	Manajemen kinerja, SOP, inovasi proses	Partisipasi, transparansi, kolaborasi, akuntabilitas sosial

Sumber: diolah penulis

## **F. Konsep Kunci dan Unit Analisis dalam Ilmu Pemerintahan**

Agar penelitian pemerintahan memiliki arah yang jelas, peneliti perlu memahami konsep kunci yang lazim digunakan dalam literatur pemerintahan serta menentukan unit analisis yang tepat. Unit analisis adalah “apa” yang diteliti (misalnya organisasi, kebijakan, program, jejaring aktor, atau interaksi layanan), sedangkan konsep adalah “bagaimana” peneliti memberi makna dan mengukur fenomena yang diteliti.

### **1. Konsep-Konsep Kunci dalam Kajian Pemerintahan**

Beberapa konsep kunci yang sering muncul dalam kajian pemerintahan antara lain: pemerintah, pemerintahan, negara, kewenangan, legitimasi, kebijakan publik, pelayanan publik, birokrasi,

desentralisasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kapasitas pemerintahan (*state/government capacity*), serta kinerja pemerintahan (*government performance*).

Konsep-konsep tersebut tidak hanya definisi kamus. Dalam penelitian, konsep harus dioperasionalkan: diturunkan menjadi indikator atau kategori analisis yang dapat diamati. Misalnya, konsep “akuntabilitas” dapat dioperasionalkan melalui indikator keterbukaan informasi, keberadaan mekanisme pengaduan, kualitas pengawasan internal, atau keterlaksanaan keputusan. Konsep “kapasitas” dapat dioperasionalkan melalui indikator kompetensi SDM, dukungan anggaran, sistem informasi, dan kemampuan koordinasi lintas unit.

Pengoperasionalan konsep ini akan dibahas lebih lanjut pada bab-bab metode kuantitatif dan kualitatif. Namun, penting dipahami sejak awal bahwa ontologi ilmu pemerintahan mengarahkan konsep mana yang relevan: karena fokusnya pada kewenangan dan pelayanan, konsep seperti legitimasi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan menjadi sangat sentral.

## **2. Level Analisis: Mikro, Meso, dan Makro**

Fenomena pemerintahan dapat dianalisis pada beberapa level. Level mikro berfokus pada individu dan interaksi langsung, misalnya perilaku aparatur layanan, pengalaman warga saat mengurus dokumen, atau praktik kepemimpinan seorang kepala desa. Level meso berfokus pada organisasi dan jejaring, misalnya koordinasi antar dinas, desain proses layanan terpadu, atau kolaborasi pemerintah dengan organisasi masyarakat. Level makro berfokus pada sistem dan kebijakan luas, misalnya desentralisasi, reformasi birokrasi nasional, atau perubahan sistem pelayanan berbasis digital.

Pemilihan level analisis tidak bersifat hierarkis; ia harus sesuai dengan pertanyaan penelitian. Penelitian tentang “mengapa warga enggan menggunakan layanan daring” lebih tepat dianalisis pada level mikro-meso. Sementara penelitian tentang “dampak desentralisasi fiskal terhadap kualitas layanan kesehatan antar daerah” cenderung berada pada level makro.

**Tabel 1.3. Level Analisis dalam Penelitian Pemerintahan**

<b>Level Analisis</b>	<b>Fokus</b>	<b>Contoh Unit Analisis/Topik</b>
Mikro	Aktor individu dan interaksi layanan	Perilaku aparatur front office; pengalaman warga; praktik kepemimpinan kepala desa
Meso	Organisasi dan jejaring tata kelola	Koordinasi antar dinas; unit layanan terpadu; kolaborasi pemerintah-komunitas
Makro	Sistem pemerintahan dan kebijakan luas	Desentralisasi; reformasi birokrasi; sistem perencanaan dan penganggaran; digital <i>government</i>

Sumber: diolah penulis

### **3. Menentukan Unit Analisis secara Tepat**

Kesalahan umum dalam penelitian pemerintahan adalah mencampuradukkan unit analisis. Misalnya, peneliti ingin menilai “kinerja pemerintah daerah”, tetapi data yang dikumpulkan hanya dari beberapa aparatur pada satu dinas. Secara metodologis, ini menimbulkan masalah generalisasi karena unit analisis sebenarnya adalah “dinas” atau “organisasi layanan”, bukan “pemerintah daerah” secara keseluruhan.

Unit analisis harus dinyatakan secara eksplisit dalam proposal penelitian. Jika penelitian menilai kebijakan, unit analisisnya bisa berupa dokumen kebijakan dan proses implementasinya. Jika penelitian menilai relasi pemerintah-warga, unit analisisnya bisa berupa interaksi layanan, mekanisme partisipasi, atau forum musyawarah. Pernyataan unit analisis yang jelas akan memandu pemilihan metode pengumpulan data, teknik analisis, serta batas kesimpulan.

## **G. Distingsi Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Politik dan Administrasi Publik**

Pembeda antara disiplin tidak selalu tegas; kenyataannya, ketiganya sering saling meminjam konsep dan metode. Namun,

pembedaan tetap penting agar peneliti tidak keliru menempatkan fokus dan kontribusi penelitian. Ilmu pemerintahan, ilmu politik, dan administrasi publik dapat dibedakan melalui fokus pertanyaan, objek forma, serta tujuan analisis.

### **1. Ilmu Politik: Kekuasaan dan Proses Politik**

Ilmu politik pada umumnya memusatkan perhatian pada kekuasaan: bagaimana kekuasaan diperoleh, dipertahankan, didistribusikan, dan diperebutkan. Unit analisisnya dapat berupa partai politik, sistem pemilu, perilaku memilih, elite politik, gerakan sosial, atau proses pembuatan keputusan dalam lembaga politik. Pertanyaan kuncinya sering berkisar pada representasi, konflik kepentingan, ideologi, serta dinamika institusi politik.

Kajian ilmu politik sangat relevan bagi pemerintahan karena legitimasi pemerintah sering lahir dari proses politik (misalnya pemilu). Namun, ketika fokus penelitian berpindah pada bagaimana keputusan dilaksanakan, bagaimana layanan diberikan, dan bagaimana kewenangan bekerja sehari-hari, maka fokusnya cenderung masuk ke ranah ilmu pemerintahan atau administrasi publik.

### **2. Administrasi Publik: Manajemen Organisasi Publik dan Implementasi Kebijakan**

Administrasi publik umumnya memusatkan perhatian pada pengelolaan organisasi publik dan implementasi kebijakan. Ia mengkaji bagaimana sumber daya manusia dikelola, bagaimana struktur organisasi dirancang, bagaimana sistem anggaran dan kinerja disusun, serta bagaimana program pemerintah diimplementasikan secara efektif. Pertanyaan kuncinya sering berkaitan dengan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan reformasi birokrasi.

Administrasi publik sangat penting dalam memahami “mesin” pemerintahan. Namun, ilmu pemerintahan tidak berhenti pada aspek manajerial. Ia mengaitkan manajemen organisasi dengan mandat politik, kewenangan hukum, serta relasi pemerintah–warga. Dengan demikian, administrasi publik dapat dipandang sebagai salah satu komponen penting dalam kajian pemerintahan, tetapi bukan keseluruhan kajian pemerintahan.

### 3. Ilmu Pemerintahan: Kewenangan, Pelayanan, dan Tata Kelola Urusan Publik

Ilmu pemerintahan memusatkan perhatian pada penyelenggaraan urusan publik melalui kewenangan yang sah, dengan orientasi pelayanan dan akuntabilitas. Ia mengkaji bagaimana mandat politik dan kerangka hukum diterjemahkan menjadi keputusan pemerintahan, bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan melalui organisasi dan jejaring, serta bagaimana dampaknya bagi warga dan legitimasi pemerintah.

Dalam praktik penelitian, ilmu pemerintahan sering bertanya: bagaimana desain kewenangan memengaruhi kualitas layanan; bagaimana koordinasi antar lembaga mengatasi masalah publik; bagaimana partisipasi warga membentuk kebijakan; atau bagaimana akuntabilitas bekerja dalam pemerintahan daerah. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadikan ilmu pemerintahan sebagai disiplin yang menghubungkan politik, hukum, administrasi, dan masyarakat.

**Tabel 1.4. Perbedaan Fokus Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Administrasi Publik**

<b>Dimensi</b>	<b>Ilmu Politik</b>	<b>Ilmu Pemerintahan</b>	<b>Administrasi Publik</b>
Objek forma	Kekuasaan dan proses politik	Kewenangan yang sah, penyelenggaraan urusan publik, relasi pemerintah-warga	Manajemen organisasi publik dan implementasi kebijakan
Pertanyaan khas	Siapa berkuasa, bagaimana kekuasaan diperebutkan?	Bagaimana kewenangan dijalankan dan dipertanggungjawabkan; bagaimana layanan/kebijakan berdampak pada warga?	Bagaimana organisasi publik dikelola agar efektif dan efisien?
Fokus analisis	Aktor politik, institusi politik, perilaku politik	Proses governing, akuntabilitas, pelayanan, koordinasi, tata kelola	Struktur organisasi, SDM, anggaran, kinerja, reformasi birokrasi

Dimensi	Ilmu Politik	Ilmu Pemerintahan	Administrasi Publik
Ukuran keberhasilan	Stabilitas politik, representasi, dukungan publik	Legitimasi, kualitas layanan, nilai publik, akuntabilitas	Efisiensi, efektivitas, produktivitas organisasi
Metode yang sering dipakai	Survei perilaku politik, analisis institusi, studi partai/pemilu	Studi kebijakan dan pelayanan, studi kasus, analisis kelembagaan, kombinasi legalistik-empirik	Analisis organisasi, evaluasi program, pengukuran kinerja, manajemen publik

Sumber: diolah penulis

## H. Implikasi Ontologi Ilmu Pemerintahan terhadap Penelitian

Ontologi bukan pembahasan abstrak yang berhenti pada definisi. Ia memiliki implikasi praktis bagi seluruh tahapan penelitian: mulai dari memilih topik, merumuskan masalah, memilih teori, menentukan data, sampai menentukan metode analisis. Dalam konteks ilmu pemerintahan, pengakuan bahwa objek forma berpusat pada relasi kewenangan dan pelayanan memberi beberapa konsekuensi metodologis berikut.

### 1. Menentukan Fokus Masalah: Kewenangan, Proses, atau Dampak Layanan

Pertama, penelitian pemerintahan sebaiknya secara eksplisit menempatkan masalah dalam salah satu (atau kombinasi) fokus: (a) desain dan distribusi kewenangan; (b) proses penyelenggaraan pemerintahan (*governing*) seperti koordinasi, implementasi, dan pengawasan; dan/atau (c) dampak kebijakan dan pelayanan bagi warga, termasuk legitimasi dan kepercayaan publik.

Sebagai contoh, topik “pelayanan perizinan usaha” dapat dirumuskan menjadi masalah kewenangan (tumpang tindih kewenangan antar instansi), masalah proses (panjangnya rantai birokrasi dan koordinasi), atau masalah dampak (akses layanan yang tidak adil bagi pelaku UMKM). Ketiga fokus tersebut akan menghasilkan pertanyaan penelitian dan strategi pengumpulan data yang berbeda.

## **2. Memilih Unit Analisis yang Konsisten dengan Relasi Pemerintah-Warga**

Kedua, karena relasi pemerintah–warga menjadi pusat analisis, peneliti perlu memastikan bahwa unit analisis mencerminkan relasi tersebut. Misalnya, jika penelitian membahas legitimasi, data perlu mencakup perspektif warga (survei kepercayaan, wawancara penerima layanan, analisis pengaduan). Jika penelitian membahas kewenangan, data perlu mencakup kerangka hukum, struktur organisasi, serta praktik penggunaan kewenangan dalam keputusan nyata.

Kesalahan yang sering terjadi adalah penelitian mengklaim membahas “kualitas pemerintahan”, tetapi hanya menggunakan data internal organisasi pemerintah. Dalam ontologi ilmu pemerintahan, kualitas pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pengalaman warga dan dampak publik. Karena itu, penelitian pemerintahan idealnya melibatkan data yang merepresentasikan sisi pemerintah dan sisi warga, meskipun proporsinya bisa berbeda sesuai fokus penelitian.

## **3. Menempatkan Dimensi Legalistik dan Empirik Secara Seimbang**

Ketiga, tindakan pemerintah selalu terkait dengan norma hukum (legalistik), tetapi berlangsung dalam kenyataan sosial (empirik). Ontologi ilmu pemerintahan menuntut peneliti untuk tidak berhenti pada analisis normatif “seharusnya”, dan tidak pula mengabaikan kerangka legal yang menjadi dasar kewenangan. Penelitian pemerintahan yang kuat biasanya memadukan keduanya: memahami dasar kewenangan dan prosedur, sekaligus menguji bagaimana prosedur itu dijalankan dan dirasakan.

Sebagai contoh, dalam penelitian tentang penyaluran bantuan sosial, peneliti perlu memahami aturan dan kriteria penerima, mekanisme penetapan data, serta pembagian kewenangan antar level pemerintahan. Pada saat yang sama, peneliti perlu mengkaji realitas lapangan: akurasi data, praktik verifikasi, potensi eksklusi kelompok rentan, dan pengalaman warga penerima.

#### 4. Contoh Perumusan Masalah Penelitian yang Berangkat dari Ontologi Pemerintahan

Berikut beberapa contoh perumusan masalah yang selaras dengan ontologi ilmu pemerintahan (relasi kewenangan dan pelayanan):

- Bagaimana desain kewenangan layanan administrasi kependudukan memengaruhi kecepatan dan keadilan akses layanan bagi warga di Kabupaten/Kota X?
- Mengapa koordinasi antar perangkat daerah dalam penanganan banjir di Kota X belum efektif, dan mekanisme pemerintahan apa yang dapat memperkuat akuntabilitas lintas sektor?
- Bagaimana kualitas pelayanan kesehatan primer memengaruhi tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah daerah, dan faktor kelembagaan apa yang menentukan variasi kualitas tersebut?
- Bagaimana praktik penggunaan diskresi oleh pejabat publik memengaruhi kepastian layanan dan persepsi keadilan warga, terutama pada layanan perizinan dan bantuan sosial?

#### 5. Menyusun kerangka berpikir awal

Kerangka berpikir awal (*conceptual framework*) dalam penelitian pemerintahan sebaiknya memperjelas: (a) aktor utama (pemerintah, aparatur, warga, mitra nonpemerintah); (b) mekanisme kewenangan (aturan, prosedur, koordinasi, diskresi); (c) proses layanan/kebijakan (*input-proses-output*); dan (d) *outcome* publik (kepuasan, akses, keadilan, kepercayaan). Dengan kerangka ini, peneliti dapat memilih apakah penelitian akan memakai pendekatan kuantitatif (mengukur hubungan antar variabel), kualitatif (memahami proses dan makna), atau kombinasi (*mixed methods*).

Bab-bab selanjutnya akan membahas paradigma penelitian, cara menemukan masalah dan kebaruan, peran teori dan legalistik, serta desain kuantitatif dan kualitatif. Namun, seluruhnya akan lebih mudah dipahami jika pembaca memegang satu prinsip: metode penelitian adalah alat, sedangkan ontologi adalah kompas yang menunjukkan arah kajian.

## I. Rangkuman

Inti pokok Bab 1 dapat dirangkum sebagai berikut:

- Ilmu pemerintahan merupakan disiplin ilmu sosial yang menelaah penyelenggaraan urusan publik melalui kewenangan yang sah, dengan orientasi pelayanan dan akuntabilitas.
- Objek materia ilmu pemerintahan mencakup realitas negara, pemerintahan, kebijakan, birokrasi, pelayanan publik, dan tata kelola urusan publik. Objek forma menyoroti relasi pemerintah-rakyat dalam penggunaan kewenangan untuk mengatur dan melayani.
- Konsep kekuasaan perlu dibedakan dari kewenangan; legitimasi dan akuntabilitas menjadi syarat penting agar kewenangan diterima dan dijalankan untuk kepentingan publik.
- Pelayanan publik dan nilai publik menjadi indikator konkret kualitas pemerintahan, sekaligus sumber kepercayaan (*trust*) dan legitimasi.
- Ilmu pemerintahan beririsan dengan ilmu politik dan administrasi publik, tetapi memiliki titik berat khas pada mekanisme kewenangan, proses *governing*, dan dampaknya bagi warga.
- Ontologi ilmu pemerintahan memandu penelitian dalam menentukan fokus masalah, unit analisis, keseimbangan legalistik-empirik, serta penyusunan kerangka berpikir.

# BAB 2

## FILSAFAT ILMU DAN METODOLOGI PENELITIAN PEMERINTAHAN

---

---

### A. Pendahuluan

Bab 1 menegaskan bahwa ilmu pemerintahan memiliki objek forma khas: relasi antara yang memerintah dan yang diperintah yang diwujudkan melalui kewenangan, pelayanan publik, serta mekanisme akuntabilitas. Jika objek dan fokus kajian telah dipahami, pertanyaan berikutnya adalah: bagaimana pengetahuan ilmiah tentang pemerintahan dibangun secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan?

Pertanyaan itu tidak dapat dijawab hanya dengan memilih teknik pengumpulan data atau perangkat analisis statistik. Di balik setiap pilihan metode, terdapat asumsi-asumsi filosofis yang kerap tidak disadari. Asumsi tersebut menyangkut: (1) apa yang dianggap sebagai “realitas” dalam pemerintahan (ontologi); (2) bagaimana peneliti dapat mengetahui realitas itu (epistemologi); dan (3) untuk apa pengetahuan itu digunakan serta nilai apa yang menyertainya (aksiologi).

Dalam praktik akademik, banyak kekeliruan metodologis berawal dari ketidakselarasan antara asumsi filosofis, rumusan masalah, dan metode yang dipilih. Misalnya, peneliti ingin memahami makna pengalaman warga terhadap pelayanan publik, tetapi memilih instrumen

# BAB 3

## MASALAH PENELITIAN DAN STATE-OF-THE-ART

---

---

### A. Pendahuluan

Penelitian pemerintahan tidak dimulai dari pilihan metode, melainkan dari masalah. Masalah penelitian berperan sebagai kompas yang mengarahkan peneliti untuk menentukan fokus, kerangka teoretis, strategi pengumpulan data, serta bentuk analisis yang relevan. Dalam praktik akademik, banyak naskah proposal atau skripsi/tesis/disertasi tampak rapi secara format, namun rapuh secara substansi karena masalahnya kabur: topik terlalu luas, pertanyaan tidak dapat dijawab, atau argumen mengulang temuan lama tanpa kebaruan.

Ilmu pemerintahan memiliki kekhasan karena berurusan dengan realitas publik yang kompleks: kewenangan dan relasi kekuasaan, desain kelembagaan, kebijakan publik, pelayanan, serta akuntabilitas. Kompleksitas ini membuat peneliti sering tergoda untuk “menceritakan semua hal” tentang suatu daerah, program, atau lembaga. Padahal, penelitian ilmiah menuntut reduksi analitis: menyederhanakan realitas secara bertanggung jawab agar dapat dijelaskan, dipahami, atau dievaluasi dengan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan (Booth, Colomb, & Williams, 2008; Creswell & Creswell, 2018).

Bab ini membahas dua pekerjaan inti yang kerap menentukan kualitas penelitian sejak awal. Pertama, bagaimana mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian pemerintahan secara akademik. Kedua,

# BAB 4

## PERAN TEORI DAN LEGALISTIK DALAM ANALISIS PEMERINTAHAN

---

---

### A. Pendahuluan

Dalam penelitian ilmu pemerintahan, dua kata kunci sering hadir bersamaan tetapi tidak selalu dikelola secara tepat, yaitu teori dan legalistik. Teori membantu peneliti “melihat” pola di balik peristiwa pemerintahan, menjelaskan mengapa suatu kebijakan bekerja atau gagal, serta menilai hubungan antara aktor, institusi, dan proses. Sementara itu, legalistik menempatkan pemerintahan sebagai praktik kewenangan publik yang berakar pada norma: apa yang boleh, wajib, dan dilarang, serta bagaimana pembagian tugas dan wewenang dibentuk oleh peraturan.

Kekhasan ilmu pemerintahan terutama dalam konteks Indonesia terletak pada relasi antara pemerintah dan warga yang dimediasi oleh kewenangan dan pelayanan publik (Ndraha, 2003; Syafiie, 2022). Relasi ini tidak berdiri di ruang hampa; ia selalu terkait dengan landasan hukum (konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, hingga kebijakan teknis). Oleh karena itu, penelitian pemerintahan yang mengabaikan kerangka hukum berisiko kehilangan konteks paling mendasar: dari mana kewenangan berasal, apa tujuan normatifnya, dan batas-batas apa yang ditetapkan oleh hukum.

# BAB 5

## METODE PENELITIAN KUANTITATIF DALAM PEMERINTAHAN

---

---

### A. Pendahuluan

Penelitian kuantitatif merupakan salah satu pilar utama dalam tradisi ilmu sosial modern. Dalam ilmu pemerintahan, pendekatan ini digunakan untuk mengukur fenomena pemerintahan yang dapat dinyatakan dalam angka misalnya kepuasan layanan publik, tingkat kepercayaan warga, kinerja organisasi perangkat daerah, indeks transparansi, efektivitas program, atau variasi partisipasi warga pada level lokal. Melalui pengukuran yang terstandar, penelitian kuantitatif memungkinkan peneliti melakukan generalisasi, membandingkan antarwilayah/antarwaktu, serta menguji hubungan antarkonsep secara terkontrol.

Namun demikian, pemerintahan bukan sekadar kumpulan angka. Ia adalah arena relasi kewenangan, norma, institusi, dan praktik yang kerap kompleks serta sarat nilai. Karena itu, penelitian kuantitatif dalam pemerintahan perlu dirancang secara cermat agar tidak terjebak pada reduksionisme yakni menyederhanakan realitas pemerintahan hanya menjadi indikator-indikator yang terukur, tanpa memahami konteks kelembagaan dan legalistik yang melingkupinya. Bab ini menjelaskan bagaimana pendekatan kuantitatif dapat digunakan secara tepat: mulai dari landasan filosofi, desain penelitian, penyusunan variabel dan

# BAB 6

## METODE PENELITIAN

### KUALITATIF DAN STUDI

### KASUS

---

---

#### A. Pendahuluan

Penelitian pemerintahan berhadapan dengan realitas yang tidak selalu dapat direduksi menjadi angka. Keputusan publik, pelayanan, kepatuhan terhadap aturan, tata kelola organisasi, serta relasi pemerintah-warga mengandung makna, pengalaman, dan penafsiran yang sangat dipengaruhi oleh konteks. Dalam situasi seperti itu, pendekatan kualitatif menjadi penting karena memungkinkan peneliti memahami fenomena pemerintahan dari dalam: bagaimana aktor memberi arti pada tindakan, bagaimana prosedur dipraktikkan, dan bagaimana kekuasaan serta norma bekerja dalam keseharian birokrasi.

Metode kualitatif dalam ilmu pemerintahan tidak berarti menolak ukuran atau generalisasi secara total. Ia lebih menekankan bahwa sebelum mengukur, peneliti sering perlu memastikan apa yang sebenarnya diukur, bagaimana suatu konsep hadir dalam praktik, dan faktor kontekstual apa yang membentuk perilaku aparatur maupun warga. Dengan demikian, penelitian kualitatif dapat berfungsi sebagai eksplorasi awal, pendalaman penjelasan, atau penguatan interpretasi terhadap temuan kuantitatif. Dalam banyak tema pemerintahan, kualitatif bahkan menjadi pendekatan utama karena pertanyaan penelitiannya bersifat “bagaimana” dan “mengapa”, bukan sekadar “berapa”.

# BAB 7

## TEKNIK PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA LAPANGAN

---

---

### A. Pendahuluan

Penelitian lapangan dalam ilmu pemerintahan menuntut ketelitian metodologis sekaligus kepekaan institusional. Peneliti tidak hanya berhadapan dengan “fakta” sosial, melainkan juga dengan struktur kewenangan, prosedur formal, serta relasi kuasa yang membentuk akses terhadap data. Di kantor pemerintahan, misalnya, dokumen kerap dianggap sebagai “milik organisasi”; wawancara dapat dipengaruhi hierarki jabatan; dan observasi terhadap pelayanan publik sering dipagari aturan internal serta protokol keamanan. Oleh karena itu, kompetensi kerja lapangan tidak cukup dipahami sebagai keterampilan teknis (misalnya membuat pedoman wawancara), tetapi harus dipadukan dengan pemahaman tentang etika, legalitas, dan strategi membangun kepercayaan.

Bab ini membahas teknik pengumpulan data lapangan yang lazim digunakan dalam penelitian pemerintahan wawancara, observasi, dokumentasi/arsip, dan survei serta cara menganalisisnya secara terintegrasi. Pembahasan menempatkan data lapangan dalam konteks karakteristik studi pemerintahan: adanya kerangka regulasi, unit analisis yang seringkali berbasis organisasi atau kebijakan, serta keterlibatan aktor negara dan nonnegara yang bekerja dalam jejaring tata kelola. Dengan demikian, bab ini diharapkan membantu pembaca menyusun prosedur lapangan yang sistematis, aman, dan menghasilkan temuan yang kredibel.

# DAFTAR PUSTAKA

---

---

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Babbie, E. (2016). *The practice of social research* (14th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Barzelay, M. (2001). *The new public management: Improving research and policy dialogue*. Berkeley: University of California Press.
- Bhaskar, R. (1978). *A realist theory of science*. London: Verso.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative research for education: An introduction to theories and methods* (5th ed.). Boston: Pearson.
- Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2008). *The craft of research* (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Bryman, A. (2016). *Social research methods* (5th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Bungin, B. (2015). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Charmaz, K. (2014). *Constructing grounded theory* (2nd ed.). London: Sage.
- Cochran, W. G. (1977). *Sampling techniques* (3rd ed.). New York: John Wiley & Sons.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Cohen, J., Cohen, P., West, S. G., & Aiken, L. S. (2018). *Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences* (3rd ed.). New York: Routledge.

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Crotty, M. (1998). *The foundations of social research: Meaning and perspective in the research process*. London: SAGE Publications.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). New York: Routledge.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The Sage handbook of qualitative research* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- DeVellis, R. F. (2017). *Scale development: Theory and applications* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Dicey, A. V. (1885). *Introduction to the study of the law of the constitution*. London: Macmillan.
- Dillman, D. A., Smyth, J. D., & Christian, L. M. (2014). *Internet, phone, mail, and mixed-mode surveys: The tailored design method* (4th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. New York: Wiley.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Feyerabend, P. (1975). *Against method*. London: Verso.
- Field, A. (2013). *Discovering statistics using IBM SPSS Statistics* (4th ed.). London: Sage.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). London: Sage.
- Fowler, F. J. (2014). *Survey research methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Gerring, J. (2007). *Case study research: Principles and practices*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariat dengan program IBM SPSS* (Edisi terbaru). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Groves, R. M., Fowler, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E., & Tourangeau, R. (2009). *Survey methodology* (2nd ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. Dalam N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? *Field Methods*, 18(1), 59–82.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action* (Vol. 1). Boston: Beacon Press.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Boston: Cengage.
- Hart, C. (1998). *Doing a literature review: Releasing the research imagination*. London: SAGE Publications.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing public policy: Governance in theory and in practice*. London: SAGE Publications.
- Hobbes, T. (1651). *Leviathan*. London: Andrew Crooke. (Edisi modern tersedia dalam berbagai penerbit).
- Hood, C. (1983). *The tools of government*. London: Macmillan.
- Howlett, M. (2011). *Designing public policies: Principles and instruments*. London: Routledge.
- Keraf, A. S., & Dua, M. (2001). *Ilmu pengetahuan: Sebuah tinjauan filosofis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kerlinger, F. N., & Lee, H. B. (2000). *Foundations of behavioral research* (4th ed.). Fort Worth: Harcourt College Publishers.
- Kooiman, J. (2003). *Governing as governance*. London: SAGE Publications.
- Kothari, C. R. (2004). *Research methodology: Methods and techniques* (2nd ed.). New Delhi: New Age International.
- Kuhn, T. S. (1962). *The structure of scientific revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

- Lakatos, I. (1970). Falsification and the methodology of scientific research programmes. Dalam I. Lakatos & A. Musgrave (Eds.), *Criticism and the growth of knowledge*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Newbury Park, CA: Sage.
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. New York: Russell Sage Foundation.
- Machi, L. A., & McEvoy, B. T. (2016). *The literature review: Six steps to success* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maxwell, J. A. (2013). *Qualitative research design: An interactive approach* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Merton, R. K. (1968). *Social theory and social structure* (Enlarged ed.). New York: Free Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. (Edisi yang lebih baru dipilih untuk menghindari duplikasi).
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, T. (2004). *Kybernologi: Sebuah rekonstruksi ilmu pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Harlow: Pearson.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nugroho, R. (2017). *Public policy* (Edisi revisi). Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). *Psychometric theory* (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.

- Okoli, C. (2015). A guide to conducting a standalone systematic literature review. *Communications of the Association for Information Systems*, 37, 879–910.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Osborne, S. P. (Ed.). (2010). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. London: Routledge.
- Parsons, W. (1995). *Public policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Peters, B. G. (2010). *The politics of bureaucracy* (6th ed.). London: Routledge.
- Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). *Systematic reviews in the social sciences: A practical guide*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). *Governance, politics and the state*. London: Macmillan Press.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public management reform: A comparative analysis - Into the age of austerity* (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Popper, K. (1959). *The logic of scientific discovery*. London: Hutchinson.
- Pound, R. (1910). Law in books and law in action. *American Law Review*, 44, 12–36.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland*. Berkeley: University of California Press.
- Punch, K. F. (2014). *Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches* (3rd ed.). London: SAGE Publications.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652–667.
- Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*. Buckingham: Open University Press.
- Ridley, D. (2012). *The literature review: A step-by-step guide for students* (2nd ed.). London: SAGE Publications.

- Ridwan HR. (2016). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabatier, P. A. (1986). Top-down and bottom-up approaches to implementation research: A critical analysis and suggested synthesis. *Journal of Public Policy*, 6(1), 21–48.
- Saldaña, J. (2016). *The coding manual for qualitative researchers* (3rd ed.). London: Sage.
- Schwartz-Shea, P., & Yanow, D. (2012). *Interpretive research design: Concepts and processes*. New York: Routledge.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach* (7th ed.). Chichester: Wiley.
- Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*. Boston: Houghton Mifflin.
- Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. *Education for Information*, 22(2), 63–75.
- Silverman, D. (2016). *Qualitative research* (4th ed.). London: Sage.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. (Edisi yang lebih baru dipilih).
- Suriasumantri, J. S. (2013). *Filsafat ilmu: Sebuah pengantar populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. (Edisi yang lebih baru dipilih).
- Syafiie, I. K. (2022). *Ilmu pemerintahan: Dari klasik sampai kontemporer*. Bandung: Mandar Maju.
- Tamanaha, B. Z. (2004). *On the rule of law: History, politics, theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Tracy, S. J. (2010). Qualitative quality: Eight “big-tent” criteria for excellent qualitative research. *Qualitative Inquiry*, 16(10), 837–851.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222.
- Trochim, W. M. K., Donnelly, J. P., & Arora, K. (2016). *Research methods: The essential knowledge base* (2nd ed.). Boston: Cengage Learning.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Universitas Terbuka. (2025). *IPEM4407 Metodologi ilmu pemerintahan* (Edisi 3). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Wagenaar, H. (2011). *Meaning in action: Interpretation and dialogue in policy analysis*. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
- Wasistiono, S., & Simangunsong, F. (2015). *Metodologi ilmu pemerintahan* (Edisi revisi yang diperluas). Bandung: IPDN Press.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. Berkeley: University of California Press.
- Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. *MIS Quarterly*, 26(2), xiii–xxiii.
- Wooldridge, J. M. (2013). *Introductory econometrics: A modern approach* (5th ed.). Mason, OH: Cengage.
- Yanow, D., & Schwartz-Shea, P. (Eds.). (2014). *Interpretation and method: Empirical research methods and the interpretive turn* (2nd ed.). New York: Routledge.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

# BIOGRAFI PENULIS

---

---



**Dr. Drs. H. M. Harry Mulya Zein, M.Si.**

Penulis lahir di Pandeglang pada tanggal 19 Juli 1960. Ia memulai perjalanan pendidikannya di Pandeglang, dari SD hingga SMA. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia untuk program studi Administrasi Negara (S1) dan Ilmu Administrasi (S2). Harry kemudian meraih gelar doktoral di bidang Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjajaran.

Sepanjang karirnya, Dr. Harry Mulya Zein telah menduduki berbagai posisi penting. Di awal kariernya, beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Penyusunan Program pada tahun 1994, lalu meraih posisi sebagai Kepala Bidang Sosial Budaya pada tahun 1996. Beliau terus menanjak dengan menjadi Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada tahun 1997, Camat Cipondoh pada tahun 1998, dan Asisten Administrasi Pemerintahan-SETDA pada tahun 2001. Tidak berhenti di situ, Dr. Harry juga pernah menjabat sebagai Asisten Pengendalian Pembangunan-SETDA dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2002, Sekda Kota Tangerang pada tahun 2004, Kepala Sekretariat KASN pada tahun 2015, dan Asisten Komisioner pada tahun 2019. Hingga saat ini, beliau aktif sebagai dosen di IPDN sejak tahun 2015.

Dalam dunia penulisan, Dr. Harry Mulya Zein telah menghasilkan berbagai karya ilmiah dan buku. Beberapa judul yang menonjol di antaranya adalah "Ziarah Budaya Kota Tangerang: Menuju Masyarakat Berperadaban Akhlakul Karimah", "Kultur Birokrasi Menebar Kepentingan Warga", "Transformasi Birokrasi, dan "Reformasi Birokrasi: Belajar dari Daerah". Selain itu, beliau juga banyak berkarya dengan menulis artikel ilmiah di jurnal nasional dan jurnal internasional bereputasi.

Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang kaya, Dr. Harry Mulya Zein tampil sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam bidang pemerintahan dan pendidikan. Karyanya mencerminkan pemikiran mendalam dan komitmen yang kuat untuk memajukan negeri.

Email Penulis: [harry.zein@ipdn.ac.id](mailto:harry.zein@ipdn.ac.id)



### **Dr. H. Rusdjiman Soemaatmadja, M.Si.**

Seorang akademisi dan praktisi pemerintahan senior yang lahir di Ciamis pada 23 Oktober 1957. Beliau memiliki latar belakang pendidikan yang sangat kuat di bidang pemerintahan, dimulai dari APDN Bandung, Sarjana Politik di IIP Jakarta, Magister Akuntansi Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, hingga puncaknya meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada tahun 2021.

Karier birokrasinya terentang luas dengan pengalaman kepemimpinan yang matang, mulai dari menjabat sebagai Camat Ciamis hingga meraih penghargaan Camat Teladan Tingkat Provinsi Jawa Barat pada tahun 1994. Di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, beliau telah dipercaya menduduki berbagai posisi strategis, termasuk Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Organisasi, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, serta Kepala Badan Kesbangpol. Atas dedikasi dan loyalitasnya selama puluhan tahun, beliau dianugerahi tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun dan 30 Tahun oleh Presiden Republik Indonesia.

Saat ini, beliau aktif mengabdikan sebagai Widyaiswara Ahli Utama serta menjabat sebagai Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Pramita Indonesia Tangerang. Selain berkarier di birokrasi dan akademisi, beliau juga aktif dalam forum ilmiah internasional, seperti seminar model desentralisasi di Burapha University, Thailand, serta menjadi penyaji dalam Sidang Orasi Ilmiah di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta. Pengalaman panjangnya dalam tata kelola pemerintahan menjadikan pemikirannya sangat relevan bagi pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia.



### **Dr. Drs. Syamsul Bahri, M.M.**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu Pemerintahan dimulai pada tahun 1992 silam. Selepas menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Kota Tangerang dengan memilih Jurusan A1 (FISIKA) dan berhasil lulus pada tahun 1992. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi D3 di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Angkatan 04 dan Tamat pada Tahun 1995, kemudian melanjutkan S1 pada Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) di Jakarta Tahun 2000, Tahun 2006 menyelesaikan Jenjang S2 pada Program Magister Manajemen STIE ABI Surabaya, dan Tahun 2021 menyelesaikan pendidikan Doktoral Ilmu Pemerintahan (DIP) pada IPDN Jatinangor.

Penulis saat ini disamping berkarier sebagai ASN pada Pemerintah Kota Tangerang berbagai jabatan telah diembannya mulai dari pelaksana pada bagian umum dan pemerintahan setda, serta staf kecamatan, eselon IV pernah menduduki sebagai kasi pemerintahan kelurahan, Kepala Subbag pada Bagian Pemerintahan Setda, Eselon 3 dipercaya menjadi Kepala Bidang Telematika di Dinas Kominfo, Camat Periuk dan Sekretrais Dinas Kominfo, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Sekretaris BKPSDM dan saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi Setda, dan disamping itu aktif juga sebagai dosen magister ilmu pemerintahan pada Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) Tangerang dan dipercaya menjadi Direktur LPPM dan Kepala Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan di Kampus yang sama, harapan dengan menulis buku agar dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [syamsulb1973@gmail.com](mailto:syamsulb1973@gmail.com)



## **Dr. Asep Kusnadi, M.Pd.**

Lahir di Ciamis 8 Mei 1967. Ketertarikan penulis terhadap metodologi penelitian dimulai pada tahun 2002 silam saat mengambil magister penelitian dan evaluasi pendidikan di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta. Mulai tahun 2005 penulis menjadi dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian di STAI Madinatul Ilmi Depok (2000-2020). Dan 2013 mengambil program doctor pada program studi teknologi pendidikan di Universitas Negeri Jakarta (2013-2017). Beberapa aktifitas penulis disamping menjadi dosen, pernah menjadi kepala sekolah di Pondok Pesantren Arafah Bogor (2005-2013), Wakil Dekan I FKIP Universitas Djuanda Bogor (2016-2017). Wakil Direktur Pondok Pesantren al-Musthafawiyah Bogor (2020-2022), dosen professional STIT INSIDA Jakarta (2012-sekarang) dengan tugas tambahan sebagai Ketua STIT INSIDA.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Teknologi Pendidikan. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan penulis saat ini aktif menulis dalam jurnal penelitian nasional. Penulis juga menulis buku modul pembelajaran Penelitian Tindakan Kelas. Selain menulis buku penulis juga aktif menjadi narasumber diluar kegiatan kampus melalui wadah pusat pendidikan wawasan kebangsaan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi DKI Jakarta. Bergabung pula dalam wadah Pandu Edukasi Nasional Jakarta. Instruktur Latihan dasar Penelitian untuk siswa SLTA se DKI Jakarta. Hal ini dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [asepk.mizanilmu@gmail.com](mailto:asepk.mizanilmu@gmail.com)



### **Dr. Sisca Septiani, M.Pd.**

Penulis mengenyam Pendidikan S1 pada Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Pasundan Bandung dan berhasil lulus pada tahun 2008. Penulis kemudian melanjutkan S2 pada Prodi Administrasi Pendidikan dengan konsentrasi Manajemen Pendidikan Makro di Universitas Islam Nusantara Bandung. Penulis melanjutkan S3 pada Prodi Manajemen Kependidikan di Universitas Negeri Semarang dan lulus pada tahun 2024. Penulis memulai terjun dalam dunia Pendidikan dengan menjadi guru di Sekolah Menengah Pertama dari tahun 2010 di SMPN 3 Purwakarta sampai dengan tahun 2019. Tahun 2015 sampai dengan 2022 di STIE Wibawa Karta Raharja Purwakarta. Tahun 2025 menjadi dosen di Pascasarjana Universitas Ngudi Waluyo Semarang. Penulis aktif pada penulisan buku, penelitian dan penulisan karya ilmiah. Penulis aktif di beberapa organisasi seperti Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia, Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia, Asosiasi Riset Ilmu Manajemen dan Bisnis Indonesia. Penulis juga aktif sebagai editorial team dan reviewer pada jurnal nasional terindeks sinta, jurnal internasional dan jurnal internasional terindeks scopus.

Email Penulis: [sisseptiani@gmail.com](mailto:sisseptiani@gmail.com)

# METODE PENELITIAN ILMU PEMERINTAHAN

Buku Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan ini disusun sebagai rujukan untuk memahami dan mempraktikkan penelitian pemerintahan secara sistematis. Pembaca diajak menelusuri fondasi disiplin melalui pembahasan hakikat serta ontologi ilmu pemerintahan, termasuk perbedaan objek materia dan objek forma. Selanjutnya, buku ini menegaskan pentingnya filsafat ilmu ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai kerangka berpikir yang menentukan desain penelitian. Bab mengenai masalah penelitian dan state-of-the-art membimbing pembaca menyusun tinjauan pustaka yang kritis guna menemukan knowledge gap, kebaruan, dan kontribusi ilmiah. Kekhasan kajian pemerintahan ditekankan melalui peran teori dan analisis legalistik dalam membaca kewenangan, prosedur, serta akuntabilitas. Metode kuantitatif dijelaskan untuk pengukuran dan pengujian hipotesis, sedangkan metode kualitatif dan studi kasus ditampilkan untuk memahami proses, makna, dan dinamika institusi secara mendalam. Buku ini juga menguraikan teknik pengumpulan dan analisis data lapangan wawancara, observasi, dokumentasi, survei beserta strategi validasi. Pada bagian akhir, pembaca dipandu menyusun laporan penelitian, menjaga etika akademik, dan mendiseminasikan temuan. Buku ini relevan bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi tata kelola. Disertai tabel, gambar, dan contoh matriks analisis, buku ini membantu pembaca menghubungkan konseptualisasi dengan langkah operasional, mulai dari penyusunan instrumen, pemilihan informan dan sampel, hingga pengelolaan data yang aman serta dapat ditelusuri. Dengan demikian, penelitian menjadi lebih tajam dan bermanfaat langsung.